



PERUBAHAN RENJA

TAHUN 2025



INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN

Jl. Basuki Rachmad No.209 Lamongan Kode Pos :62217

Telp. (0322) 321019, Fax(0322) 321144 e-mail :inspektorat@lamongankab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

INSPEKTORAT

Jl. Basuki Rachmad No. 209 Lamongan kode pos : 62217
Telp. (0322) 321019 – 321144 e-mail : Inspektorat@lamongankab.go.id
Web Site : www.lamongankab.go.id

**KEPUTUSAN
INSPEKTUR KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 100.3.3.2/ \ /KPTS/413.201/2025**

**TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025**

INSPEKTUR KABUPATEN LAMONGAN,

Menimbang : Bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2025 dalam Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Lamongan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Pemerintah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2045;

15. Peraturan Bupati

15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lamongan;
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Lamongan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang selanjutnya disebut Renja Inspektorat merupakan penjabaran RKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2025;

KETIGA : Perubahan Renja Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Perubahan RKA Inspektorat Tahun 2025;

KEEMPAT : Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Lamongan, disusun sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum menyusun Rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah agar substansi pada bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

1.1) Latar belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perubahan Perangkat Daerah, Proses penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perubahan Perangkat Daerah dengan dokumen

RKPD Perubahan, renja Perubahan K/L dan Renja Perubahan Provinsi, serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2) Landasan Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOP, Kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3) Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4) Sistematika Penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan Perangkat Daerah, serta Susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu, Bab ini memuat tentang

2.1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah S/D Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

2.2) Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3) Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, berisikan Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah

2.4) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Daerah, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN, berisi tentang:

3.1) Telaah terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2) Perubahan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025, Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3) Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025. berisikan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan perubahan program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang Kesimpulan dan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 5 Juni 2025

INSPEKTUR
KABUPATEN LAMONGAN



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bpk. Bupati Lamongan;
2. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Ka. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset
Daerah Kab. Lamongan;
5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Lamongan

KATA PENGANTAR

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berfungsi merencanakan program pengawasan, merumuskan kebijakan dan fasilitasi pengawasan serta melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Lamongan, Inspektorat adalah merupakan unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan tersebut Inspektorat Kabupaten Lamongan, secara eksplisit menetapkan kebijakan-kebijakan prioritas sebagai acuan dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Lamongan yang dituangkan dalam Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 disusun, semoga bisa terlaksana dan untuk menjadikan periksa.

Lamongan, Juni 2025

**INSPEKTUR
KABUPATEN LAMONGAN**
FARIKH S.H., M.M., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19670516 199602 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	 8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	22
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	25
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	29
 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	 32
3.1 Telaahan Terdapat Kebijakan Nasional.....	32
3.2 Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	37
3.3 Perubahan Program dan Kegiatan.....	45
 BAB IV PENUTUP.....	 66
4.1 Kesimpulan.....	66
4.2 Catatan Penting.....	66
4.3 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan.....	66
4.2 Tindak Lanjut.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2025 ini merupakan suatu tahapan operasionalisasi dari rancangan Rencana Strategis Periode Tahun 2025 - 2029 yang disusun sebagai dokumen perencanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan secara eksplisit menetapkan kebijakan-kebijakan prioritas sebagai acuan dalam melaksanakan pengawasan, sehingga target kinerja yang telah direncanakan didalam Renstra dapat tercapai dengan baik.

Selain itu dengan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Kabupaten Lamongan ini diharapkan dapat terpantau dan terevaluasi sampai sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun, sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis, sehingga dapat dilakukan koreksi jika terjadi penyimpangan ataupun perkembangan baru dilingkungan strategis yang perlu ditindaklanjuti atau diantisipasi.

Perubahan Rencana Kerja tahun 2025 Inspektorat Kabupaten Lamongan ini merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang ditetapkan dalam rancangan Rencana Strategis Periode 2025-2029 Inspektorat Kabupaten Lamongan. Adapun hasil proses ini adalah berupa Rencana Kerja Tahunan bagi Inspektorat Kabupaten Lamongan.

Perubahan Rencana Kerja ini merupakan suatu aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di masa yang akan datang untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang. Sehingga pokok dari perencanaan kinerja adalah penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan melalui ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan.

Secara umum Rencana Kerja ini merupakan alat manajemen sebagai upaya peningkatan kinerja yang mengutamakan daya analisis yang tajam dalam menentukan target dan realisasi. Oleh karena itu dalam rencana kinerja ini akan

mencantumkan Program dan Kegiatan yang terperinci untuk jangka pendek sebagai penerjemah dari sasaran yang telah ditetapkan.

Selain itu dalam Rencana Kerja, tidak hanya menyangkut langkah-langkah kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian target, meliputi pengaturan berbagai sumberdaya baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal.

Proses penyusunan Perubahan Renja sesuai dengan bahan musrenbang RKPD Kabupaten Lamongan tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Inspektorat tahun 2025-2029 sehingga memudahkan di dalam mengukur target kinerja tahunan.

Perubahan Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) Perangkat Daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten.

1.2 Landasan Hukum

Landasan idiil dari Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2025 adalah Pancasila dan landasan konstitusional adalah UUD 1945, sedangkan landasan operasional adalah meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Lamongan terutama bidang Pengawasan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Nefara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pem,erintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten lamongan Tahun 2006 Nomor 1/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lamongan;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Inspektorat Kabupaten Lamongan berdasarkan rancangan awal RPJMD Tahun 2025-2029 memuat informasi mengenai tujuan, sasaran, Indikator kinerja dan target capaian yang ingin dicapai pada tahun 2025 dan menjadi pedoman dan acuan resmi bagi Inspektorat Kabupaten Lamongan dalam penyusunan rencana Program dan Kegiatan tahun 2025 untuk mewujudkan tujuan pengawasan.

Adapun ***tujuan*** dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja adalah untuk perencanaan dibidang pengawasan yang memberikan arah kebijakan, strategi serta sasaran-sasaran dan program yang ingin dicapai selama 1(satu) tahun serta mengukur kinerja Inspektorat dalam mendukung Pembangunan Daerah.

Dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini juga terdapat informasi-informasi yang memudahkan Inspektorat dalam melakukan pengukuran dan penilaian kinerja, serta memudahkan dalam proses monitoring dan evaluasi kinerja, sehingga pada akhirnya kami dapat melakukan koreksi dini atas berbagai penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Lamongan adalah mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah serta Renstra Perangkat Daerah, yang terdiri dari 4 BAB dan beberapa lampiran yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum menyusun Rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah agar substansi pada bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

1.1) Latar belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perubahan Perangkat Daerah, Proses penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perubahan Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD Perubahan, renja Perubahan K/L dan Renja Perubahan Provinsi, serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2) Landasan Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOP, Kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3) Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan maksud dan tujuan penyusunan renja Perangkat Daerah.

1.4) Sistematika Penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan Perangkat Daerah, serta Susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu, Bab ini memuat tentang

- 2.1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah S/D Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah,
- 2.2) Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 .
- 2.3) Isu -isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, berisikan Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN, berisi tentang :

- 3.1) Telaah terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- 3.2) Perubahan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025, Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

- 3.3) Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025.
berisikan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan perubahan program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang Kesimpulan dan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah – kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah S/D Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada Bagian ini akan diuraikan mengenai kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2024 dan perkiraan pencapaian kinerja tahun 2025, serta progres pencapaian kinerja dalam Renstra periode 2021-2026 sehingga dapat teridentifikasi sampai sejauh mana Inspektorat melaksanakan program dan kegiatannya.

Untuk pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 pada umumnya realisasi program/kegiatan telah tercapai sesuai dengan target kinerja yang telah terealisasi. Keberhasilan pencapaian target kinerja ini tidak terlepas dengan adanya sumber daya aparatur, sarana, dan prasarana serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025 yang selaras dengan pencapaian target masing-masing kegiatan.

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program dan kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja sehingga dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu sebagai penyeimbang dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.

Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah adanya peningkatan dedikasi sumberdaya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lamongan.

Kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dan memberikan argumentasi atas program/kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat dianggarkan pelaksanaan program/kegiatan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dan Menuju Pemerintahan Yang Bersih (Clean Government).

Sedangkan untuk capaian kinerja pada tahun berjalan yaitu tahun 2025 dapat diprediksi bahwa pelaksanaan program / kegiatannya sesuai dengan target yang direncanakan.

Pelaksanaan Program dan kegiatan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 pada umumnya realisasi program dan kegiatan telah tercapai mendekati target untuk program/kegiatan di pertengahan tahun 2025. Bahkan terdapat salah satu program yang melebihi target rencana untuk pencapaian kinerjanya, yaitu pada program Penyelenggaraan Pengawasan.

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja dan melebihi target kinerja program dan kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.

Guna peningkatan tercapainya target kinerja di triwulan berikutnya diupayakan kedepan akan memaksimalkan SDM yang ada melalui peningkatan kualitas SDM Inspektorat Kabupaten Lamongan melalui pembinaan dan memberikan bekal pengetahuan melalui pendidikan, pelatihan dan uji kompetensi sehingga terbentuk aparatur pengawasan yang tangguh, handal dan professional, dan segera mengupayakan penambahan personil APIP maupun staf operasional.

Pencapaian kinerja tahun 2024 serta pencapaian kinerja tahun 2025 belum dapat dikaitkan dengan pencapaian target pencapaian kinerja tahunan dalam Rencana Strategis Inspektorat Periode 2021-2026, dikarenakan Rencana Kerja 2025 masih dalam tahun berjalan. Untuk lebih jelasnya uraian mengenai evaluasi pelaksanaan RENJA Inspektorat Tahun 2025 dan Capaian RENSTRA periode 2021-2026 akan disajikan dalam Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Lamongan sampai dengan Tribulan II Tahun 2025

No	Sasaran Renja	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan PD Tahun 2025 s/d Triwulan II		Cat
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Meningkatnya pengawasan yang profesional dengan didukung pelaksanaan tugas dan fungsi inspektorat	6	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SKM Inspektorat	85	84,81	84,70	84,81	100,12%	84,81	0	-
		6	0	0	2.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan penggaran dan evaluasi	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	9 Dokumen	100%	11 Dokumen	4 Dokumen	
		6	0	0	2.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Inspektorat)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	5 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	125%	7 Dokumen	4 Dokumen	

No	Sasaran Renja	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikaor Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan PD Tahun 2025 s/d Triwulan II		Cat
											Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	
		6	0	0	2.	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terbit tepat waktu	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	
		6	0	0	2.	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	5 Laporan	
		6	0	0	2.	0	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang	48 Orang	47 Orang	48Orang	102%	48 Orang	48 Orang	
		6	0	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	-	
		6	0	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Tribulana n/ Semesteran OPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semest eran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	100%	18 Laporan	9 Laporan	

No	Sasaran Renja	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikaor Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan PD Tahun 2025 s/d Triwulan II		Cat
												Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	
									Bulanan/ Triwulanan/Semester SKPD								
		6	0	0	2.			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan kepegawaian	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	5 Laporan	
		6	0	0	2.	0		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	70 paket	190 paket	-	-	-	-	-	
		6	0	0	2.	0		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 orang	53 orang	3 orang	7 orang	233%	68 Orang	-orang	
		6	0	0	2.			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan persediaan barang dan jasa	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	5 Laporan	

No	Sasaran Renja	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikaor Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan PD Tahun 2025 s/d Triwulan II		
											Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Cat
		6	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	0	
		6	0	0	2.	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan rumah Tangga Yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	0	
		6	0	0	2.	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 Paket	35 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	0	
		6	0	0	2.	0	Penyediaan Barang dan Cetakan dan Pengganda an	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	3 Paket	3 Paket	100%	3 Paket	- paket	
		6	0	0	2.	0	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	7 Dokumen	7 Dokumen	

No	Sasaran Renja	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan PD Tahun 2025 s/d Triwulan II		Cat
											Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	
		6	0	0	2.	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	86 Laporan	50 Laporan	60 Laporan	120%	50 Laporan	15 Laporan	
		6	0	0	2.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase aset dalam keadaan baik	82%	100%	81%	100%	123,46%	81%	-	
		6	0	0	2.	0	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	-	12 unit	12 unit	100%	-	-	
		6	0	0	2.	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	-	4 unit	4 unit	100%	4 unit	-	
		6	0	0	2.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan yang tersedia dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No	Sasaran Renja	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikaor Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan PD Tahun 2025 s/d Triwulan II		
												Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Terget	Realisasi	
		6	0	0	2	0		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	14 Laporan	117%	12 Laporan	-	
		6	0	0	2	0		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	5 Laporan	
		6	0	0	2	0		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	5 Laporan	
		6	0	0	2			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Laporan	5 Laporan	

No	Sasaran Renja	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikaor Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan PD Tahun 2025 s/d Triwulan II		Cat
											Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	
		6	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	1 unit	-	
		6	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perijinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 unit	26 unit	21 unit	26 unit	123,81%	21 unit	-	
		6	0	0	2.	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	-	
		6	0	0	2.	0	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1 unit	1 unit	-	-	-	1 Unit	-	

No	Sasaran Renja	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikaor Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan PD Tahun 2025 s/d Triwulan II		
											Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	
							dan Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi								
		6	0	0	2		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Presentase Rekomendasi Laporan Pengawasan APIP dan BPK yang ditindaklanjuti	90%& 85%	99,59 & 92%	97% & 90%	99,59 & 92%	113%&102%	98% dan 91%	50%&0	
		6	0	0	2		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan	180 Laporan	471 Laporan	100 Laporan	183 Laporan	183%	100 Laporan	50 Laporan	
		6	0	0	2	0	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan	7 Laporan	4 Laporan	7 Laporan	175%	4 Laporan	-	
		6	0	0	2	0	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	60 Laporan	103 Laporan	40 Laporan	43 Laporan	108%	40 Laporan	16 Laporan	
		6	0	0	2	0	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	7 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	100%	11 Laporan	9 Laporan	

No	Sasaran Renja	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikaor Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2023			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan PD Tahun 2024 s/d Triwulan II		
											Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	
		6	0	0	2.	0	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	40 Laporan	52 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	26 Laporan	9 Laporan	
		6	0	0	2.	0	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	100 Laporan	212 Laporan	27 Laporan	27 Laporan	100%	27 Laporan	15 Laporan	
		6	0	0	2.	0	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	3 Kesepakatan	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	100%	1 Kesepakatan	0	
		6	0	0	2.	0	Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0	
		6	0	0	2.		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah LHP	20 Laporan	55 Laporan	10 Laporan	31Laporan	310%	10 LHP	0 LHP	

No	Sasaran Renja	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan PD Tahun 2025 s/d Triwulan II	
											Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi
		6	0	0	2	0	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	3 Laporan	15 Laporan	5 Laporan	13 Laporan	260%	5 Laporan	0
		6	0	0	2	0	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	20 Laporan	40 Laporan	5 Laporan	18 Laporan	360%	5 Laporan	0 Laporan
		6	0	0	2	0	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perumusan Kebijakan yang dilegalitaskan	72%	100%	90%	100%	111%	95%	100%
		6	0	0	2	0	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kebijakan yang difasilitasi terkait pengawasan	4 Dokumen	4 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	133%	3 Dokumen	0 Dokumen
		6	0	0	2	0	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di	3 Rekomendasi	6 Rekomendasi	-	-	-	1 Rekomendasi	0 Rekomendasi

No	Sasaran Renja	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikaor Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan PD Tahun 2025 s/d Triwulan II		
											Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	
								Bidang Pengawasan yang Disusun								
		6	0	0	2.	0	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100%	1 Rekomendasi	0	
		6	0	0	2.		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang pendampingan dan asistensi	25 Perangkat Daerah	25 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	100%	10 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	
		6	0	0	2.	0	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	5 Perangkat Daerah	25 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	100%	10 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	
		6	0	0	2.	0	Pendampingan dan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian RB	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian	25 Perangkat Daerah	63 Perangkat Daerah	63 Perangkat Daerah	63 Perangkat Daerah	100%	4 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	

No	Sasaran Renja	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikaor Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2023			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan PD Tahun 2024 s/d Triwulan II		
												Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	
									Reformasi Birokrasi								
		6	0	0	2.	0		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	6 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	2 Kegiatan	1 Kegiatan	
		6	0	0	2.	0		Pendampingan dan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	62 Perangkat Daerah	63 Perangkat Daerah	63 Perangkat Daerah	63 Perangkat Daerah	100%	63 Perangkat Daerah	62 Perangkat Daerah	

2.2 Analisis kinerja Pelayanan PD

Dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat berkoordinasi dan berkonsultasi baik dengan Inspektorat Provinsi Jawa Timur, selaku unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah tingkat provinsi maupun BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Sehubungan dengan masih terbatasnya tenaga fungsional Auditor pada Inspektorat Kabupaten Lamongan, maka Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Lamongan senantiasa mengupayakan pemenuhan akan kebutuhan tenaga fungsional tersebut baik melalui seleksi CPNS maupun pelimpahan dari OPD, sampai saat ini, telah ada 23 (dua tiga) orang auditor, yang seharusnya jumlah ideal auditor sebanyak 40 (empat puluh). Jabatan Fungsional Auditor yang sudah ada yang terdiri dari auditor pertama sebanyak 8 (delapan) orang, auditor Muda sebanyak 11 (sebelas) orang dan auditor madya sebanyak 4 (empat) orang yang diharapkan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat dapat lebih mandiri, profesional dan akuntabel dalam melakukan pembinaan pengawasan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Sedangkan untuk pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mana dalam rangka proses pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan anggaran Perangkat Daerah dilakukan secara manual maupun menggunakan aplikasi Komputer sehingga tertib administrasi pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik Inspektorat Kabupaten Lamongan, maka Analisa Capaian Kinerja yang dipakai untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan

pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi.

Untuk mengukur keberhasilan capaian kinerja dimaksud, digunakan instrument pengukuran ordinal dengan memperhitungkan indikator masukan, keluaran dan hasil.

Adapun Persentase skala pengukuran kinerja adalah sebagai berikut:

85-100	=	Sangat baik/Sangat berhasil
70-<85	=	Baik/Berhasil
55-<70	=	Kurang Baik/Kurang Berhasil
<55	=	Sangat Kurang Baik/Tidak Berhasil

Pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada Tabel 2.2

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan PD
Inspektorat Kabupaten Lamongan

No.	Indikator Sasaran	SPM /Standar Nasional	IKK PP- 6/08	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi				Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Kapabilitas APIP			Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
2	Manajemen Resiko Indeks			1,0	1,2	1,4	1,6	3,038	2,825	2.983	2.983	2,9	2,9	
3	Nilai Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi			1,6	1,7	1,8	2,0	1.824	2,0	2,420	2,420	2,42	2,42	
4	Nilai SAKIP Inspektorat			89,05	89,10	89,20	89,30	90,57	91,36	91,40	91.51	91.51	91.51	

Dari hasil kinerja pada tahun 2024 jika dimasukkan pada scoring tolok ukur capaian kinerja diperoleh sebagai berikut:

No.	Sasaran	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Pengawasan yang Profesional dengan di dukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat	Sangat berhasil
2	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Sangat berhasil

Dari Tabel 2 dapat kita jelaskan bahwa pencapaian kinerja pelayanan PD Inspektorat Kabupaten Lamongan dapat realisasi 100% bahkan ada melebihi dari target kinerja ini berarti sangat baik/sangat berhasil. Hal ini dikarenakan adanya perencanaan yang matang dan adanya peningkatan dedikasi sumberdaya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dengan wilayah yang begitu luas memungkinkan betapa kompleksnya manajemen di bidang pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu adanya pengawasan sejak perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan dari seluruh program dan kegiatan di masing-masing Instansi Pemerintah / Perangkat Daerah di Kabupaten Lamongan. Mengingat sistem pemerintahan dapat berjalan dengan baik apabila pengawasan berjalan secara optimal dan efektif.

Sebelum dapat menentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat, terlebih dahulu harus mengetahui permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Inspektorat, sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 2.3

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Lamongan

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Inspektorat
			Internal	Eksternal	
Kepatuhan terhadap perundang-undangan	Masih adanya temuan berulang	Tidak adalagi temuan berulang	Unsur pembinaan dari APIP belum Efektif	Dorongan atasan langsung belum maksimal (komitmen)	Unsur pembinaan APIP belum maksimal
Kapabilitas APIP	Kopetensi APIP belum merata/sebagian memadahi	Seluruh APIP memiliki kopetensi memadahi	Jumlah Auditor belum memadahi	Kuota diklat pembentukan auditor terbatas dan rekrutmen CPNS belum ada.	Kopetensi APIP masih perlu ditingkatkan
Profesionalisme APIP	Peningkatan profesionalisme APIP harus ditingkatkan	Level kapabilitas APIP (Internal Audit)	Kopetensi APIP dan Jumlah Auditor belum memadahi	Sebagian besar pembentukan auditor melalui impassing tidak melalui diklat pembentukan	Terbatasnya anggaran terhadap peningkatan profesionalisme APIP
Efektifitas Dampak Pemeriksaan	Masih Belum Efektif, terlihat dari masih tingginya jumlah dan kualitas temuan pemeriksaan dari setiap hasil pemeriksaan	Semakin rendahnya jumlah dan kualitas Temuan pemeriksaan	Kualitas SDM auditor	Kurang terbukanya obrik dalam memberikan informasi kondisi nyata dalam Perangkat Daerah nya	Kurangnya komitmen kepala Perangkat Daerah terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan antara lain adanya temuan pemeriksaan yang berulang

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Inspektorat
			Internal	Eksternal	
Kuantitas Auditor	Hanya ada 20 orang yang sudah bersertifikasi	Idealnya Inspektorat Kabupaten Lamongan memiliki 40 auditor	Keterbatasan Sumber Daya Manusia	Penyelenggaraan Pendidikan JFA masih terbatas	Kompetensi dan Kecermatan Profesional Aparatur Pengawasan belum seluruhnya memadai;

Analisis SWOT yang dipergunakan oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan dibidang pengawasan di dasarkan pada faktor internal (kekuatan dan Kelemahan) dan Faktor-faktor Eksternal (peluang dan ancaman) di Inspektorat Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan (Strengths)

- a. Adanya dukungan dana APBD untuk pengawasan;
- b. Adanya personil Inspektorat dengan latar belakang yang berbeda-beda;
- c. Adanya sarana dan prasarana pengawasan internal;
- d. Adanya kewenangan penyelenggaraan pengawasan.

2. Kelemahan (weakness)

- a. Adanya orang-orang baru dalam pengawasan (<2 tahun) langsung menjalankan fungsi pengawasan;
- b. Jumlah obyek pemeriksaan tidak sebanding dengan jumlah APIP Inspektorat.
- c. Kompetensi dan Kecermatan Profesional Aparatur Pengawasan belum seluruhnya memadai;
- d. Kebijakan terkait penyelenggaraan pengawasan baik standar, kode etik maupun kendali mutu perlu ditingkatkan serta kebijakan terkait tindak lanjut, TP/TGR, Reviu, evaluasi, Monitoring, penyelenggaraan konsultasi dan pembinaan oleh APIP, penyelenggaraan SPIP;
- e. Pengawasan belum didukung dengan Sistem informasi pengawasan berbasis teknologi informasi secara memadai;
- f. Independensi APIP belum memadai.

3. Peluang (Opportunities)

- a. Adanya Jafung yang mempunyai kesempatan kenaikan pangkat lebih cepat yakni setiap 2 (dua) tahun;
- b. Adanya Pelatihan/bimtek audit bagi auditor dilingkungan Inspektorat.

4. Ancaman (Threats)

- a. Kurangnya komitmen kepala Perangkat Daerah terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- b. Adanya temuan pemeriksaan yang berulang;
- c. Perkembangan peraturan penyelenggaraan pengawasan yang cepat sehingga menuntut pemeriksa selalu up-to date;

- d. Adanya perkembangan teknologi informasi yang menuntut peningkatan kompetensi pengawas;

Berdasarkan permasalahan/isu strategis tersebut untuk mendukung misi Pemerintah Kabupaten, yaitu Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan, maka isu yang utama untuk dipecahkan/faktor kunci keberhasilan sesuai kesimpulan dari SWOT Perencanaan Strategi Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 ditetapkan untuk meningkatkan kualitas pengawasan internal, antara lain :

1. Peningkatan Kapabilitas APIP
2. Penguatan SPIP dimasing-masing Perangkat Daerah;
3. Inspektorat tidak hanya menjadi watchdog tetapi sebagai *Quality Assurance* dari Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lamongan.
4. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis Risiko
5. Percepatan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan Internal maupun Internal.

2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Lamongan tidak secara langsung terlibat dengan masyarakat, LSM, serta Organisasi lainnya. Oleh karena itu sampai dengan saat ini Inspektorat Kabupaten Lamongan belum pernah mendapatkan usulan program atau kegiatan dari para stakeholders.

Inspektorat Kabupaten Lamongan dalam mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra 2025-2029) dan Rencana Kerja Inspektorat merupakan penjabaran dari susunan dan program yang dilakukan seiring dengan kebijakan anggaran dan komitmen seluruh Staf, namun dalam pelaksanaannya didukung pula dengan beberapa program sesuai dengan Kemendagri 050-5889 Tahun 2021.

Usulan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lamongan sebagai pelayanan aparatur, pada Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025 murni merupakan usulan program dan kegiatan dari internal Inspektorat, karena tidak ada

program/kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan seperti kelompok masyarakat lainnya dalam forum Musrenbang Kabupaten Lamongan.

Tabel 2.4
USULAN PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025
KABUPATEN LAMONGAN

NAMA PD: INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6
NIHIL					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD

3.1 Telaahan Terdapat Kebijakan Nasional dan Provinsi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan, maka arah kebijakan Inspektorat Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

- 1. Inspektorat Daerah melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah sebagai pelaksanaan tugas dari Bupati.**
- 2. Pembinaan dan Pengawasan tersebut dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah.**
- 3. Tujuan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap perangkat daerah oleh Inspektorat Daerah adalah:**
 - a. pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
 - b. pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
 - c. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
 - d. akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

4. **Fokus pengawasan kepala daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 yang dilakukan oleh Inspektorat adalah:**

- a. Pemeriksaan Kinerja terhadap program/kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025 dengan sasaran program/kegiatan yang memiliki risiko tinggi.
- b. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu:
 - o pemeriksaan investigatif dengan sasaran penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi;
 - o penjatuhan sanksi administratif kepada bupati/wali kota, dan DPRD oleh inspektorat provinsi selaku perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya; dan
 - o penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dengan sasaran kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
- c. Pengawasan yang bersifat mandatori/harus dilakukan oleh inspektorat, meliputi:
 - ☐ Kinerja Rutin Pengawasan
 - 1. Reviu rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) dengan sasaran menjaga konsistensi rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dengan RPJMD serta meyakinkan penyusunan RPJMD dan Renstra PD telah sesuai dengan kaidah perencanaan;
 - 2. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan (RKPD, Renja PD, KUA, PPAS, dan RKA SKPD termasuk perubahannya) dengan sasaran menjaga konsistensi RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, menjaga konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan dokumen penganggaran daerah

serta meyakinkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan telah sesuai dengan kaidah perencanaan;

3. Reviu laporan keuangan pemerintah daerah dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang dilakukan dan laporan keuangan telah disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
4. Reviu laporan kinerja dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas;
5. Reviu laporan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dengan sasaran memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam LPPD;
6. Pemeriksaan atas penagihan penerimaan negara bukan pajak dengan sasaran meyakinkan pemerintahan daerah telah melaksanakan optimalisasi dalam penagihan penerimaan negara bukan pajak;
7. Reviu dana alokasi khusus (DAK) Fisik dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah dalam penyaluran DAK Fisik telah memenuhi persyaratan dokumen;
8. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan sasaran menilai kehandalan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Monitoring penyerapan anggaran/pemeriksaan kas dengan sasaran memberikan keyakinan bahwa target penyerapan anggaran dan pengelolaan kas daerah telah sesuai dengan perencanaan; dan

10. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah dengan sasaran terhadap temuan pemeriksaan yang berlarut larut penyelesaiannya.

□ Pengawasan Prioritas Nasional

1. Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dengan sasaran meyakinkan penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi mengacu pada perjanjian kerja sama Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar dengan sasaran meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar;
3. Evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsive gender) dengan sasaran meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender;
4. Dana Desa:

Daerah Kabupaten melakukan pemeriksaan dana desa dengan sasaran meyakinkan pemerintah desa telah mengelola dana desa mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundangundangan;
5. Bantuan Operasional Sekolah (BOS):

Inspektorat melakukan pemeriksaan bantuan operasional sekolah dasar dengan sasaran meyakinkan sekolah telah mengelola dana BOS mulai dari penyaluran, penggunaan dan

pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

5. Pengawasan Reformasi Birokrasi

- a. Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dengan sasaran meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- b. Asistensi pembangunan reformasi birokrasi dengan sasaran pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi:
 1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 2. Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
 3. Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
 4. Penilaian internal Zona Integritas;
 5. Penanganan Benturan Kepentingan;
 6. Penanganan laporan pengaduan (Whistle Blower System); dan
 7. Penanganan pengaduan masyarakat.

6. Penegakan Integritas

- a. Dukungan pelaksanaan survei penilaian integritas dengan sasaran meyakinkan kesiapan pemerintah daerah dan tersedianya alokasi anggaran secara memadai;
- b. Monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi dengan sasaran aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh KPK dan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Tim Stranas PK.

7. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

- a. Penerapan Manajemen Risiko;
- b. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
- c. Audit Kinerja;
- d. Audit Investigasi;
- e. Pemeriksaan DAK Fisik;
- f. Pendidikan berjenjang Jabatan Fungsional Auditor; dan
- g. Pendidikan Sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

3.2 Perubahan Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

Tujuan adalah suatu hasil yang ingin dicapai organisasi dan merupakan target – target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, disamping itu pencapaian target – target ini merupakan ukuran keberhasilan kerja. Berdasarkan visi, misi dan faktor – faktor kunci keberhasilan Inspektorat Kabupaten Lamongan menetapkan tujuan sebagai berikut :

“Meningkatkan efektifitas fungsi pengawasan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan”.

Dalam kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan sasaran yang harus dicapai Inspektorat Kabupaten Lamongan yaitu sebagai berikut:

” Meningkatkan pengawasan yang profesional dengan di dukung pelaksanaan tugas dab fungsi Inspektorat”.

Perumusan tujuan dan sasaran Inspektorat untuk Tahun 2025 didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 3.2

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Tahun 2025

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Target Sasaran Tahun 2025	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Sasaran Tahun 2025	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	"Meningkatkan efektifitas fungsi pengawasan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan"	Maturitas SPIP	Level 3	Meningkatnya pengawasan yang profesional dengan didukung pelaksanaan tugas dan fungsi inspektorat	Kapabilitas APIP	Level 3	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
									Pengawasan Desa
									Reviu Laporan Keuangan
									Kerjasama Pengawasan Internal
									Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP
								Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
									Pengawasan dengan tujuan tertentu
					Manajemen Resiko Indeks	2,9		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
									Reviu Laporan Kinerja

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Target Sasaran Tahun 2025	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Sasaran Tahun 2025	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
					Nilai Indeks Efektifitas pencegahan korupsi	2,42	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
									Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
								Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah
									Pendampingan dan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian RB
									Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan korupsi
									Pendampingan dan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
				Meningkatnya manajemen Internal PD	Nilai SAKIP Inspektorat Kab. Lamongan	91,51	Program penunjang urusan daerah	Jumlah Dokumen perencanaan penggaran dan evaluasi	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
									Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Target Sasaran Tahun 2025	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Sasaran Tahun 2025	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran Perangkat Daerah
								Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
								Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan komponen listrik/Penerangan Bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang dan Cetakan dan Penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Target Sasaran Tahun 2025	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Sasaran Tahun 2025	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
								Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel
									Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
									Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
									Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Target Sasaran Tahun 2024	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Sasaran Tahun 2024	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perijinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Kinerja Utama

Sasaran Inspektorat Kabupaten Lamongan dijadikan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Lamongan, berdasarkan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Lamongan diputuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagaimana Tabel 3.2.2.

Tabel 3.2.2

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Lamongan

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
Meningkatnya pengawasan yang profesional dengan didukung pelaksanaan tugas dan fungsi inspektorat	Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Indikator keberhasilan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan APIP mengacu kepada enam elemen yang dinilai dalam kerangka kapabilitas APIP. Enam elemen tersebut adalah sebagai berikut: 1. Peran dan Layanan (Services and Role) 2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (People Management) 3. Praktik Profesional (Professional Practices) 4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (Performance Management and Accountability) 5. Budaya dan Hubungan Organisasi (Organizational Relationship and Culture) 6. Struktur Tata Kelola (Governance Structures)	Renstra PD	Irban Wilayah I, II, III, Auditor dan Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
	Manajemen Resiko Indeks	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Area Komponen yang dinilai yaitu: 1. Perencanaan 2. Kapabilitas 3. Hasil	Renstra PD	Irban Wilayah I, II, III, Auditor dan Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan
	Nilai Indeks Efektifitas pencegahan korupsi (IEPK)	Nilai Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK)	Penilaian terdiri dari pilar: 1. Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi 2. Penerapan Strategi Pencegahan 3. Penanganan Kejadian Korupsi	Renstra PD	Irban Investigasi dan Auditor
Meningkatnya manajemen Internal PD	Nilai SAKIP Inspektorat Kab. Lamongan	Hasil Evaluasi SAKIP Oleh Inpektorat Kab. Lamongan	Nilai SAKIP merupakan akumulasi penilaian dari komponen manajemen kinerja yang dievaluasi yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Kinerja. Nilai SAKIP PD dikeluarkan oleh Inspektorat	Renstra PD dan LKJIP	Sekretaris, Kasubbag Umum dan Kepegawaian, serta Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

3.3 Perubahan Program dan Kegiatan PD Tahun 2025

Penyusunan perubahan Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Lamongan yang direncanakan dalam Renja Inspektorat Kabupaten Lamongan mengacu pada:

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021;
- Keputusan Inspektur Kabupaten Lamongan Nomor : 188/15 /Kep/413.201/2021 tentang Renstra Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026.
- Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2024 Maupun Renja Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2025;
- Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008;

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan perubahan program dan kegiatan, diantaranya terkait dengan:

- a. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah;
- b. Mandatory Pengawasan

Sehubungan dengan hal tersebut maka pada tahun 2025 Inspektorat Kabupaten Lamongan merencanakan 3 (tiga) Program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) Sub Kegiatan yang dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 3.3.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

Program	Kegiatan	Sub. Kegiatan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD
		Evaluasi Kinerja PD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran OPD

Program	Kegiatan	Sub. Kegiatan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan komponen listrik/Penerangan Bangunan kantor
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang dan Cetakan dan Penggandaan
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Mebel
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perijinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan

Program	Kegiatan	Sub. Kegiatan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
		Reviu Laporan Kinerja
		Reviu Laporan Keuangan
		Pengawasan Desa
		Kerjasama Pengawasan Internal
		Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
		Pengawasan dengan tujuan tertentu
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah
		Pendampingan dan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian RB
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan korupsi
		Pendampingan dan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Dari uraian tersebut diatas total kebutuhan anggaran sebesar Rp. 16.403.154.559 dari rencana awal sebesar Rp. 16.009.652.336 sehingga ada penambahan anggaran sebesar Rp. 393.502.223, adapun rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025 pada Inspektorat Kabupaten Lamongan dapat diuraikan dalam Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegia tan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan / Pergeseran Alokasi Anggaran			Ket.
						Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target	Indikator Kinerja Program (outcome)/K egiatan (output)	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					BELANJA LANGSUNG							16.009.652.336	16.403.154.559	393.502.223	
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH	Nilai SKM Inspektorat	82	Nilai SKM Inspektorat	83	Inspektorat	Inspektorat	14,612,352,336	15,251,532,605	4,197,864,017	
6	01	01	2.0 1		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaa n penggaran dan evaluasi	8 Dokum en	Jumlah Dokumen perencanaan penggaran dan evaluasi	8 Dokumen	Inspektorat	Inspektorat	51,500,000	65,125,000	13,625,000	
6	01	01	2.0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Inspektorat)	Jumlah Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	4 Doku men	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Inspektorat	Inspektorat	50,000,000	43,825,000	7,325,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan / Pergeseran Alokasi Anggaran			Ket.
						Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target	Indikator Kinerja Program (outcome)/K egiatan (output)	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang	
6	01	01	2.0 1	0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Inspektorat)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Inspektorat	Inspektorat	30,000,000	21,300,000	6,300,000	
6	01	01	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	12 Lap	Jumlah Laporan Keuangan	12 Lap	Inspektorat	Inspektorat	11,614,266,692	13,045,256,237	2,910,842,393	
6	01	01	2.0 2	0 1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang	Inspektorat	Inspektorat	11,569,266,692	13,142,602,290.87	1,573,335,598,87	
6	01	01	2.0 2	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	3 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	3 Laporan	Inspektorat	Inspektorat	20,000,000	14,375,000	4,375,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan / Pergeseran Alokasi Anggaran			Ket.
						Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target	Indikator Kinerja Program (outcome)/K egiatan (output)	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang	
						Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
6	01	01	2.0	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Tribulan/Semesteran OPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Inspektorat	Inspektorat	25,000,000	19,188,000	2,188,000	
6	01	01	2.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kepegawaian	12 Laporan	Jumlah Dokumen kepegawaian	12 Laporan	Inspektorat	Inspektorat	1,256,050,000	647,727,000	582,727,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan / Pergeseran Alokasi Anggaran			Ket.
						Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target	Indikator Kinerja Program (outcome)/K egiatan (output)	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang	
6	01	01		09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	62 Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	63 Orang	Inspektorat	Inspektorat	1,256,050,000	647,727,000	582,727,000	
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan persediaan barang dan jasa	12 Laporan	Jumlah Laporan persediaan barang dan jasa	12 Laporan	Inspektorat	Inspektorat	202,800,000	161,007,800	48,688,800	
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	2 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	2 Paket	Inspektorat	Inspektorat	15,000,000	14,993,000	4,993,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan / Pergeseran Alokasi Anggaran			Ket.
						Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target	Indikator Kinerja Program (outcome)/K egiatan (output)	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang	
						Kantor yang Disediakan		Kantor yang Disediakan							
6	01	01	2.0 6	0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 paket	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 paket	Inspektorat	Inspektorat	15,000,000	14,988,000	(12,000)	
6	01	01	2.0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	Inspektorat	Inspektorat	47,200,000	45,619,000	(1,581,000)	
6	01	01	2.0 6	0 5	Penyediaan Barang dan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	Inspektorat	Inspektorat	20,000,000	20,000,000	(12,000)	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan / Pergeseran Alokasi Anggaran			Ket.
						Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang	
6	01	01	2.0	0	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dokumen	Inspektorat	Inspektorat	17,000,000	17,000,000	-	
6	01	01	2.0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	Inspektorat	Inspektorat	88,600,000	48,407,800	(40,192,200)	
6	01	01	2.0	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase aset dalam keadaan baik	82%	Persentase aset dalam keadaan baik	82%	Inspektorat	Inspektorat	552,800,000	552,783,000	(17,000)	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan / Pergeseran Alokasi Anggaran			Ket.
						Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target	Indikator Kinerja Program (outcome)/K egiatan (output)	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang	
6	01	01	2.0 7	0 0 9	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Inspektorat	Inspektorat	552,800,000	552,783,000	(17,000)	
6	01	01	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan yang tersedia dengan baik	100%	Persentase pelayanan yang tersedia dengan baik	100%	Inspektorat	Inspektorat	624,935,744	522,696,368	(102,239,376)	
6	01	01	2.0 8	0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan	Inspektorat	Inspektorat	8,000,000	7,996,000	(4,000)	
6	01	01	2.0 8	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	Inspektorat	Inspektorat	236,000,000	236,000,000	-	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan / Pergeseran Alokasi Anggaran			Ket.
						Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target	Indikator Kinerja Program (outcome)/K egiatan (output)	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang	
						yang Disediakan		yang Disediakan							
6	01	01	2.0 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lapo ran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Inspektorat	Inspektorat	380,935,744	287,879,368	(93.056.379)	
6	01	01	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaa n barang	12 Lapo ran	Jumlah laporan pemeliharaan barang	12 Laporan	Inspektorat	Inspektorat	281,500,000	256,937,200	(24,562,800)	
6	01	01	2.0 9	0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	1 unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	1 unit	Inspektorat	Inspektorat	45,000,000	42,882,200	(2,117,800)	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan / Pergeseran Alokasi Anggaran			Ket.
						Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target	Indikator Kinerja Program (outcome)/K egiatan (output)	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang	
					Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	dan Dibayarkan Pajaknya		Dibayarkan Pajaknya							
6	01	01	2.0 9	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perijinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 unit	Inspektorat	Inspektorat	119,500,000	117,965,000	(1,535,000)	
6	01	01	2.0 9	0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 item	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 item	Inspektorat	Inspektorat	57,000,000	46,090,000	(10,910,000)	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan / Pergeseran Alokasi Anggaran			Ket
						Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target	Indikator Kinerja Program (outcome)/K egiatan (output)	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang	
6	01	01	2.0 9	0 9	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	1 unit	Jumlah Gedung yang dipelihara	1 unit	Inspektorat	Inspektorat	60,000,000	50,000,000	(10,000,000)	
6	01	02			Program Penyelenggara an Pengawasan	Presentase Rekomenda si Laporan Pengawasa n APIP dan BPK yang ditindaklanju ti	86% dan 82%	Presentase Rekomenda si Laporan Pengawasan APIP dan BPK yang ditindaklanju ti	87% dan 83%	Inspektorat	Inspektorat	302,000,000	164,939,000	(137,061,000)	
6	01	02	2.0 1		Penyelenggaraa n Pengawasan Internal	Jumlah Laporan	180 Lapo ran	Jumlah Laporan	180 Laporan	Inspektorat	Inspektorat	247,000,000	134,915,000	(112,085,000)	
6	01	02	2.0 1	0 2	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasa n Kinerja	1 Lapo ran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan	Inspektorat	Inspektorat	15,000,000	7,450,000	(7,550,000)	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan / Pergeseran Alokasi Anggaran			Ket
						Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target	Indikator Kinerja Program (outcome)/K egiatan (output)	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang	
						Pemerintah Daerah									
6	01	02	2.0 1	0 2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Laporan	Inspektorat	Inspektorat	25,000,000	9,330,000	(15,670,000)	
6	01	02	2.0 1	0 3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	64 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	64 Laporan	Inspektorat	Inspektorat	25,000,000	11,907,000	(13,093,000)	
6	01	02	2.0 1	0 4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	48 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	48 Laporan	Inspektorat	Inspektorat	25,000,000	13,170,000	(11,830,000)	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan / Pergeseran Alokasi Anggaran			Ket.
						Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang	
6	01	02	2.0 1	0 5	Pengawasan Desa	Terlaksananya Pengawasan Desa	54 Laporan	Terlaksananya Pengawasan Desa	54 Laporan	Inspektorat	Inspektorat	130,000,000	75,803,000	(54,197,000)	
6	01	02	2.0 1	0 6	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 Kesepakatan	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 Kesepakatan	Inspektorat	Inspektorat	16,000,000	10,135,000	(5,865,000)	

6	01	02	2.0 1	0 7	Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1 Doku men	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1 Dokumen	Inspektorat	Inspektorat	11,000,000	7,120,000	(3,880,000)	
6	01	02	2.0 2		Penyelenggaraa n Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah LHP/LHR	35 Lapo ran	Jumlah LHP/LHR	35 Laporan	Inspektorat	Inspektorat	55,000,000	30,024,000	(24,976,000)	
6	01	02	2.0 2	0 1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaia n Kerugian Negara/Dae rah yang Ditangani	15 Lapo ran	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daera h yang Ditangani	15 Laporan	Inspektorat	Inspektorat	30,000,000	14,096,000	(15,904,000)	
6	01	02	2.0 2	0 2	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan Hasil	20 Lapo ran	Jumlah Laporan Hasil	20 Laporan	Inspektorat	Inspektorat	25,000,000	15,928,000	(9,072,000)	

Kode					Urusan/ Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan / Pergeseran Alokasi Anggaran			Ket
						Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target	Indikator Kinerja Program (outcome)/K egiatan (output)	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang	
						Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu							
6	01	03	2.01		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perumusan Kebijakan yang dilegalitaskan	66%	Persentase Perumusan Kebijakan yang dilegalitaskan	66%	Inspektorat	Inspektorat	1,095,300,000	846,594,400	(248,705,600)	
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kebijakan Yang Di Fasilitasi Terkait Pengawasan	1 Dokumen	Jumlah Kebijakan Yang Di Fasilitasi Terkait Pengawasan	1 Dokumen	Inspektorat	Inspektorat	66,000,000	44,332,000	(21,668,000)	
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	3 Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	3 Rekomendasi	Inspektorat	Inspektorat	46,000,000	27,606,000	(18,394,000)	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan / Pergeseran Alokasi Anggaran			Ket
						Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang	
6	01	03	2.0 1	0 2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	Inspektorat	Inspektorat	20,000,000	16,726,000	(3,274,000)	
6	01	03	2.0 2		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah OPD yang pendampingan dan asistensi	5 Perangkat Daerah	Jumlah OPD yang pendampingan dan asistensi	5 Perangkat Daerah	Inspektorat	Inspektorat	1,029,300,000	802,262,400	(227,037,600)	
6	01	03	2.0 2	0 1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peserta Pendampingan dan Asistensi	35 Perangkat Daerah	Jumlah Peserta Pendampingan dan Asistensi	35 Perangkat Daerah	Inspektorat	Inspektorat	501,800,000	330,300,000	(171,500,000)	
6	01	03	2.0 2	0 2	Pendampingan dan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian RB	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian	10 Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian	10 Perangkat Daerah	Inspektorat	Inspektorat	32,500,000	22,791,000	(9,709,000)	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan / Pergeseran Alokasi Anggaran			Ket
						Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target	Indikator Kinerja Program (outcome)/K egiatan (output)	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang	
						dan Penilaian Reformasi Birokrasi		Reformasi Birokrasi							
6	01	03	2.0 2	0 3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberanta san korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberanta san Korupsi	4 Kegiatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberanta san Korupsi	4 Kegiatan	Inspektorat	Inspektorat	180,000,000	156,000,400	(23,999,600)	
6	01	03	2.0 2		Pendampingan dan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	62 Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	62 Perangkat Daerah	Inspektorat	Inspektorat	315,000,000	293,171,000	(21,829,000)	

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat pada Tahun 2025 telah disusun dalam Dokumen Renja Perubahan PD ini berdasarkan acuan dokumen-dokumen perencanaan ditingkat vertikal sekaligus mempertimbangkan berbagai hasil analisis terhadap perkembangan terbaru kondisi masyarakat maupun kebutuhan organisasi Perangkat daerah. Anggaran Program dan Kegiatan Inspektorat terjadi perubahan sebesar Rp. **393.502.223** dari rencana awal sebesar Rp. **16.009.652.336** menjadi Rp. **16.403.154.559** dengan menetapkan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat sebanyak 3 Program, 11 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan.

4.2 Catatan Penting

Perubahan Rencana kerja tahun 2025 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap aparat Inspektorat Kabupaten Lamongan, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada Tahun 2025. Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Berbasis Resiko masih perlu banyak penyempurnaan, Untuk itu dalam meningkatkan kinerja pengawasan maka akan ada pemeliharaan aplikasi Simario dan E-TLHP pada tahun 2025. Untuk meningkatkan nilai Maturistas SPIP dan Kapabilitas APIP maka dibutuhkan pendampingan dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur, sehingga untuk tahun berikutnya agar ada penambahan anggaran pada sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

4.3 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang direncanakan ini tergantung kepada partisipasi, sikap mental, semangat, ketaatan, disiplin serta kejujuran aparat sesuai dengan Standar Audit Intern dan Piagam audit Intern Inspektorat Kabupaten Lamongan. Selain itu dukungan maupun politikal will dari pemerintah daerah dan seluruh organisasi satuan kerja perangkat Daerah

Kabupaten Lamongan juga menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Tanpa ada dukungan tersebut kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil serta hasil yang telah dicapai dari kegiatan di bidang pengawasan tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan Pemerintah Daerah khususnya, serta masyarakat Kabupaten Lamongan pada umumnya.

4.4 Tindak Lanjut.

Untuk meningkatkan nilai Maturistas SPIP dan Kapabilitas APIP maka dibutuhkan pendampingan dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur, sehingga untuk tahun berikutnya agar ada penambahan anggaran pada sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2025 ini dibuat, semoga dapat tercapai dan dapat bermanfaat.

Lamongan, Juni 2025

INSPEKTUR
KABUPATEN LAMONGAN

A. FARBIH S.H., M.M. CGCAE
Spesial Muda
NIP. 19670516 199602 1 003